

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Global Food Security Index Tahun 2017, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat ke-69 dari 113 negara di dunia dalam hal ketahanan pangan. Posisi Indonesia ini jauh di bawah Malaysia, Vietnam dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Posisi ketahanan pangan Indonesia ini juga cenderung turun dari tahun ke tahun (GFSI, 2017). Hal tersebut menunjukkan buruknya ketahanan pangan Indonesia.

Berbagai usaha pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional telah dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai subsidi harga dasar produk pertanian, subsidi pupuk dan faktor input produksi lainnya, pembangunan infrastruktur irigasi serta sarana transportasi. Kegiatan penelitian dan pengembangan penyuluhan juga terus dilakukan untuk mendorong penguatan ketahanan pangan nasional (Sumardjo, 1999).

Menurut Leagans dalam Puspadi (2003) penyuluh berperan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan belajar, yang tidak saja dalam kegiatan pendidikan dan menjamin adopsi inovasi baru, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat dan mendorong inisiatif mereka untuk memperbaiki kehidupannya. Sejalan dengan hal itu maka peranan penyuluh dalam program ketahanan pangan di daerah sangat penting, karena penyuluh sebagai seorang komunikator, fasilitator dan motivator sangat berhubungan erat dengan upaya untuk memperbaiki pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat.

Upaya penyuluhan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dihadapkan pada tantangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang terus mengalami masalah-masalah mendasar. Persoalan dan tantangan tersebut muncul dikarenakan banyak faktor, terutama karena arah dan perubahan kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten. Sejak era pasca BIMAS, penyuluh pertanian tersebar pada berbagai dinas terkait, seperti dinas peternakan, perkebunan, kehutanan dan dinas pertanian lainnya. Sehingga pada waktu ini dikenal adanya penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluh kehutanan dan penyuluh perikanan. Pada tahun 2006 telah dikeluarkan Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang telah memberi landasan gerak dan arah bagi kegiatan penyuluhan pertanian nasional. Undang-undang ini menyatukan dan

mengintegrasikan semua latar belakang penyuluh menjadi satu wadah kelembagaan penyuluhan pada berbagai tingkatan. Di tingkat kecamatan ada Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, ditingkat kabupaten/ kota ada Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPPELUH) dan ditingkat provinsi ada Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH), sementara ditingkat pusat terbentuk Badan Pusat Penyuluhan. Namun pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang membuat kelembagaan penyuluhan kembali mendapatkan tekanan dan mesti melakukan perubahan mendasar.

Selain persoalan kelembagaan, penyuluhan pertanian di Indonesia saat ini bertumpu pada peningkatan produktivitas dan produksi. Pendekatan sentralistik dengan dukungan negara, statis dan mekanis, pola komunikasi linear, cenderung bersifat instruksional telah menjadikan petani sebagai objek pembangunan pemerintah serta menjadikan para penyuluh sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah. Penyuluhan lebih pada penekanan transfer teknologi bukan pada orangnya ataupun proses belajarnya. Pendekatan yang tidak mengutamakan manusia ini telah menghasilkan ketergantungan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah (Prawiranegara, 2016).

Penyuluhan pertanian di berbagai belahan negara berkembang sudah mengarah kepada bentuk yang modern. Penyuluhan klasik dikritik Singh (2009) karena menggunakan pendekatan mental “sebagai penyedia” (*provider mentality*) yang hanya fokus pada apa yang harus disebar, informasi tidak riil dan tidak sesuai kebutuhan nyata setempat, serta belum bertolak atas kebutuhan petani (*demand driven*). Sementara, Swanson dan Rajalahti (2010) mengkritik bahwa penyuluhan klasik masih menggunakan model transfer teknologi (*Technology Transfer Extension Models*) yang cenderung searah dan sempit, serta belum menggunakan pendekatan yang partisipatif (*Participatory Extension Approaches*). Penyebabnya adalah karena kegiatan penyuluhan yang didominasi pemerintah menerapkan sistem yang kurang inovatif (Syahyuti, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

Syahyuti (2016) mencatat selain tantangan kelembagaan terdapat beberapa hal yang mengharuskan penyuluhan pertanian berubah, antara lain tantangan dari sisi kondisi agroekologi adalah bahwa penyuluhan harus mampu merespons kebutuhan teknologi yang sangat bergantung pada zona agroekologi yang berbeda, yang tidak lagi sama sebagaimana dalam revolusi hijau. Dari sisi ekonomi politik, yang paling utama adalah pengaruh dari tahap perkembangan pembangunan, berkenaan dengan berapa besar kebijakan pemerintah dalam investasi untuk kegiatan penyuluhan pertanian. Ini tergantung dari berapa besar ketergantungan ekonomi nasional dari sektor pertanian, dan proporsi warga negara yang masih bergantung pada pertanian. Lebih khusus lagi adalah pada berapa banyak petani kecil yang mereka miliki. Selanjutnya tekanan dari sisi sosiokultural adalah adanya perbedaan-perbedaan kultural antar-petani, misalnya berapa banyak bahasa yang digunakan, proporsi keterlibatan perempuan dan laki-laki, pola agrarian, dan struktur penguasaan lahan. Menurut Qamar (2005), kondisi yang menjadi latar adalah di mana dunia menghadapi "... *pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan perdesaan dan pertanian, serta perkembangan seperti globalisasi, liberalisasi pasar, desentralisasi, privatisasi, dan demokratisasi yang menciptakan syarat-syarat pembelajaran baru untuk petani subsisten maupun komersial di negara-negara berkembang.*" Karena itu, kita membutuhkan suatu perubahan mendasar. Ringkasnya adalah dunia penyuluhan menghadapi masyarakat baru dan kelembagaan baru (Rivera 1997).

Banyak timbul kritik dari kalangan ahli bahwa penyuluhan selama ini tidak efisien dalam penggunaan anggaran untuk menjalankan kantor dan menggaji staf yang jumlahnya besar jika dibandingkan dengan bidang profesi lain di pemerintahan (Qamar 2005). Modernisasi dan reformasi membutuhkan sistem penyuluhan nasional baru untuk merespons berbagai kekuatan global yang merubah kondisi sosial-ekonomi dan politik di dunia. Hal ini juga menciptakan tantangan dan kebutuhan belajar yang baru bagi petani (Syahyuti, 2016).

Selain itu dukungan penyuluhan pertanian dalam penguatan pangan nasional sangatlah diperlukan. Sekarang ini fakta menunjukkan dukungan negara yang besar dan anggaran riset yang fokus kepada pangan belum menghasilkan inovasi dan pengetahuan

yang membawa pada penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan kepada petani. Penyuluhan pertanian memiliki peran penting mengatasi persoalan ini, karena sejatinya berperan sebagai *intermediary innovation*.

Kegiatan pengelolaan pengetahuan yang berujung pada penguatan inovasi dapat dijelaskan oleh konsep manajemen Inovasi. Manajemen inovasi semestinya juga dilaksanakan dalam kelembagaan penyuluhan untuk mengolah hasil penelitian dapat mudah dipahami masyarakat dan memberikan arah kepada lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi yang tepat dan berdampak bagi petani. Kegiatan manajemen pengetahuan dan inovasi mencakup, pengumpulan, pengorganisasian, penyebaran penggunaan dan mengeksploitasi pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi (Nawawi, 2012). Manajemen pengetahuan dan inovasi disebut sebagai alat vital dalam mendorong keberlangsungan inovasi dengan akuisisi yang dilakukan secara konsisten terhadap pengetahuan-pengetahuan baru (Akram *et al*, 2011) melalui kolaborasi berbagai unit kerja (Tobing, 2007).

Proses pengembangan hasil penelitian pertanian dan pangan membutuhkan entitas penghubung yang dapat menjalankan peran untuk menjembatani lembaga penelitian dan kelompok pengguna. Bank Dunia mengembangkan konsep entitas penghubung melalui *Agriculture innovation System (AIS)* yang memungkinkan adanya pendekatan holistik dalam proses produksi dan penggunaan pengetahuan (World Bank, 2006). Entitas penghubung dalam konsep AIS berperan sebagai: (1) unit yang menjalankan mekanisme artikulasi permintaan (*demand articulation*) untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok pengguna dan (2) mendesain penelitian yang dapat ditransformasikan menjadi produk dan jasa yang bisa digunakan (Spielman *et al*, 2012).

Manajemen pengetahuan dan inovasi dalam kegiatan diseminasi inovasi pangan bukan merupakan sebuah proses yang linear. Manajemen pengetahuan membutuhkan interaksi antara pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya dalam proses mentransformasikan pengetahuan sehingga memiliki nilai guna. Kualitas pertukaran pengetahuan sangat bergantung pada kualitas hubungan antara pelaku. Penggunaan hasil penelitian akan berlangsung secara baik jika ada identifikasi terhadap kebutuhan atau insentif tertentu untuk penggunaanya (Karner *et al*, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa inovasi yang diciptakan dibidang pertanian belum optimal atau tepat sasaran. Penelitian permata (2005), menemukan bahwa petani sebagai pengguna inovasi BPTP masih merasakan ketidakpuasan terhadap produk inovasi untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Umiarsih (2011) juga menemukan bahwa ketidakpuasan petani antara lain bersumber pada teknologi yang diberikan tidak aplikatif atau tidak dapat diterapkan oleh petani dengan kondisi yang ada saat ini. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidaktepatan inovasi yang dihasilkan, yang berarti bahwa manajemen pengetahuan belum dilaksanakan secara baik. Di sisi lain juga banyak literatur menunjukkan agar sebuah kegiatan pemberdayaan dapat berkelanjutan maka perlu pendekatan model bisnis sosial. Selama ini tantangan kelembagaan penyuluhan adalah pada aspek pendanaan dan efektifitasnya (Qamar, 2005). Sehingga dengan demikian proposisi yang dibangun dalam penelitian ini adalah: Penerapan manajemen inovasi dan model bisnis sosial yang tepat di Balai Penyuluhan Pertanian akan mendorong keberlanjutan penyuluhan dan penguatan ketahanan pangan nasional.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah: Merancang model transformasi Balai Penyuluhan Pertanian yang mampu berperan dalam manajemen inovasi dan bisnis sosial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional . Dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis keragaan Balai Penyuluhan Pertanian ditinjau dari aspek manajemen, SDM dan regulasi terkait guna merespon dan mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.
2. Mengidentifikasi bentuk pola manajemen inovasi yang bisa diterapkan pada Balai Penyuluhan Pertanian dalam kerangka memperkuat ketahanan pangan nasional
3. Mengidentifikasi bentuk bisnis sosial yang bisa diterapkan pada Balai Penyuluhan Pertanian dalam kerangka memperkuat ketahanan pangan nasional.
4. Merancang model transformasi Balai Penyuluhan Pertanian yang mampu berperan dalam manajemen inovasi dan bisnis sosial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara akademik dan kebijakan. Secara akademik akan menyumbang pada konsep penyuluhan pertanian, penguatan inovasi dan

bisnis sosial bidang pangan. Penelitian ini juga akan bermanfaat sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian dan Manajemen Inovasi Transformasi Sosial yang peneliti ampu. Secara kebijakan, akan mendorong rekayasa kebijakan dalam penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan penguatan inovasi dengan hilirisasi yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

1.3 Target Luaran Penelitian

Target luaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut, dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Ber ISSN	<i>Submitted</i>
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional
3.	Bahan ajar (ISBN)	Draft
4.	Artikel Koran	Terbit

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Konsep Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengertian ketahanan pangan dalam undang-undang ini sudah melangkah maju, objek ketahanan pangan bukan hanya sampai pada level rumah tangga, namun terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, selain mengatur tentang ketahanan pangan juga memuat tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Menurut Suryana, (2003) mewujudkan ketahanan pangan dapat diartikan sebagai berikut : 1) Terpenuhinya pangan yang cukup diartikan ketersediaan pangan.dalam arti luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 2.) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda zat lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama. 3.) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. 4.) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Secara lebih terperinci, kerangka konsep ketahanan pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan serta menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan aset rumah tangga, strategi penghidupan, dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dengan kata lain, status ketahanan pangan suatu rumah tangga, atau individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (*agro-environmental*), sosial ekonomi dan biologi dan bahkan faktor politik. Ketersediaan pangan di tingkat nasional tidak dapat menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga/individu. Ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan (dimensi fisik dan ekonomi) merupakan determinan penting dari ketahanan pangan (Braun, et al., 1992).

Sen (1981) menjelaskan kendala akses terhadap pangan tersebut terkait dengan lemahnya entitlement (faktor kepemilikan) di tingkat rumah tangga/individu, yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan kontrol terhadap pangan, yang berhubungan linear dengan tingkat aksesibilitas rumah tangga/individu terhadap pangan. Sedangkan perolehan pangan yang cukup merupakan hak azasi manusia.

Simatupang (2007) menjelaskan konsep perolehan pangan (*food entitlement paradigm*) sebagai berikut: (1) indikator akhir ketahanan pangan ialah perolehan pangan yang cukup bagi setiap individu. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus diukur pada dimensi agregat terkecil, yaitu individu.

Dengan perkataan lain, indikator akhir ketahanan pangan ialah ketahanan pangan individu (*individual food security*); (2) ketersediaan pangan merupakan syarat keharusan tetapi tidak cukup untuk menjamin perolehan pangan yang cukup bagi setiap individu, dan (3) ketahanan pangan harus dipandang sebagai suatu sistem hierarkis; ketahanan pangan nasional, provinsi (kabupaten, lokal), rumah tangga dan individual. Maxwell (1996) menyampaikan empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*), yakni: (1) kecukupan pangan, merupakan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat; (2) akses atas pangan, yakni sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberian (*transfer*); (3) ketahanan, merupakan keseimbangan antara kerentanan, resiko dan jaminan pengaman sosial, dan (4) fungsi waktu, yakni ketahanan pangan dapat bersifat

kronis, transisi - siklus ketahanan pangan terjadi ketika penduduk memiliki akses fisik dan ekonomi yang konsisten terhadap pangan yang mencukupi, aman dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi pangannya untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Kedaulatan pangan lahir dari meningkatnya akses terhadap sistem pangan dan pangan tradisional. Ini mensyaratkan kedaulatan politik dan penekanan pada transmisi pengetahuan tradisional (Socha, 2012).

1.2. Penyuluh dan Penyuluhan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama (petani) dan atau warga masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkatan administrasi pemerintah (Departemen Pertanian 2006).

Penyuluhan pada hakikatnya adalah suatu cara proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani demi tercapainya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan perbaikan kesejahteraan masyarakat atau

keluarga yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan pertanian. Penyebaran informasi yang dimaksud mencakup informasi tentang ilmu dan teknologi inovasi yang bermanfaat, analisis ekonomi dan upaya rekayasa sosial yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani serta peraturan dan kebijakan pendukung.

Tujuan utama dari penyuluhan pertanian adalah mempengaruhi para petani dan keluarganya agar berubah perilakunya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu perbaikan mutu hidup dari para keluarga tani. Penyuluh pertanian yang efektif adalah yang dapat menimbulkan perubahan informasi atau perolehan informasi baru kepada petani, memperbaiki kemampuan atau memberi kemampuan dan kebiasaan baru petani dalam upaya memperoleh sesuatu yang mereka kehendaki (Slamet 2003).

Dalam penelitian ini definisi penyuluhan adalah suatu proses pendidikan non formal yang berorientasi pada perubahan perilaku sesuai dengan yang diinginkan agar terjadi perbaikan mutu hidup masyarakat. Sedangkan definisi penyuluh adalah; pegawai negeri sipil atau honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

1.3. Peran Penyuluh

Peran penyuluh menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006, adalah memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.

Menurut SK Menpan Nomor: 19/KEP/MK WASPAN/5/1999 jabatan penyuluh pertanian terdiri dari penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli. Penyuluh pertanian terampil adalah jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, sedangkan penyuluh pertanian ahli adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metode dan teknik analisis tertentu. Seiring dengan perubahan

paradigma pembangunan pertanian yang lebih mengutamakan pembangunan manusianya, maka peran penyuluh pertanian dalam mensukseskan terjadinya perubahan pola perilaku petani menjadi semakin penting.

Padmowihardjo (2004) menyatakan bahwa tujuan penyuluhan pertanian adalah menghasilkan manusia pembelajar, manusia penemu ilmu dan teknologi, manusia pengusaha Agribisnis yang unggul, manusia pemimpin di masyarakatnya, manusia guru bagi petani lain, yang bersifat mandiri dan interdependensi, karena itu penyuluhan adalah proses pembelajaran dan proses pemberdayaan.

Menurut Rogers (1995), penyuluh adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Berdasarkan definisi tersebut, Mardikanto (2009) mengatakan bahwa peran penyuluh tidak hanya terbatas menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh sasaran penyuluhan, akan tetapi seorang penyuluh harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluhan yang diwakilinya dengan masyarakat sasaran, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga penyuluhan yang bersangkutan. Lebih lanjut dijelaskan Mardikanto (2009), terdapat tiga macam peran penyuluh yang terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) pencairan diri dengan masyarakat sasaran; (2) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan; dan (3) pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Agar lebih profesional maka seorang penyuluh harus berperan sebagai: pembawa informasi, pendengar yang baik, motivator, fasilitator proses, agen penghubung, pembentuk kemampuan, guru keterampilan, *work helper*, pengelola program, pekerja kelompok, penjaga batas, promotor, pemimpin lokal, konsultan, protektor dan pembentuk lembaga.

Peran Penyuluh sebagai Komunikator

Menurut Berlo (1960), secara umum komunikasi sering diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima). Dalam prakteknya, proses komunikasi tidak sederhana itu, antara pengirim dan penerima pesan terjadi saling berganti peran (interaktif). Oleh karena itu proses komunikasi didefinisikan sebagai proses penggunaan pesan oleh dua orang atau lebih, dimana semua pihak saling berganti peran sebagai pengirim dan penerima pesan, sampai ada saling memahami atas pesan yang disampaikan oleh semua pihak.

Tujuan komunikasi adalah tercapainya suatu pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara dua atau lebih partisipan komunikasi terhadap suatu pesan (dalam hal ini adalah ide baru) melalui saluran komunikasi tertentu. Dalam proses difusi inovasi, komunikasi memiliki peranan penting menuju perubahan sosial sesuai yang dikehendaki. Dalam komunikasi inovasi, proses komunikasi antara komunikator penyuluh dan petani tidak hanya berhenti jika komunikator telah menyampaikan inovasi atau jika sasaran telah menerima pesan tentang inovasi yang disampaikan komunikator penyuluh, namun seringkali komunikasi baru berhenti jika sasaran (petani) telah memberikan tanggapan seperti yang dikehendaki penyuluh yaitu berupa menerima atau menolak inovasi tersebut.

Arsyad (2008) menyatakan media dalam proses belajar mengajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Secara lebih rinci Luhan (2008) membagi media ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) *presentation media* adalah bentuk komunikasi yang sifatnya *face to face* seperti : pidato, ceramah, atau bentuk-bentuk komunikasi dengan lebih dari dua orang tetapi masih *face to face*; (2) *representation media* adalah media yang pesan-pesannya diwujudkan dalam bentuk simbol yang dicetak, disampaikan melalui jarak jauh dan menggunakan teknologi untuk memproduksi pesan-pesannya, misalnya: surat kabar, majalah, dan media lainnya; dan (3) *electronic* atau *mechanical media* adalah media yang penggunaannya hampir sama dengan *representation media* akan tetapi ada proses *encoding*

dan *decoding* pesan pada saat penerimaan dan pengiriman pesan, misalnya: telepon, radio, televisi, dan media lainnya.

Mengacu pada pendapat Arsyad (2008) maka media tidak hanya terbatas pada media cetak dan elektronik saja. Kegiatan seperti ceramah, pelatihan, dan bentuk lainnya yang sifatnya tatap muka dapat digolongkan sebagai media. Media dapat bersifat tatap muka, media cetak, dan juga media elektronik.

Effendy (2005) menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain sebagainya, yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa merupakan keyakinan, kepastian, keragu-raguan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (*noise*), terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik (DeVito 2002).

Mulyana (2010) melihat komunikasi sebagai proses mengubah perilaku seseorang. Kegiatan komunikasi tersebut berupa proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu dengan efek tertentu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Slamet (2003) yang melihat kegiatan komunikasi pembangunan (*development communication*) sebagai aktivitas penyuluhan pertanian (*agricultural extension education*), karena pada dasarnya tiga istilah itu semua mengacu pada disiplin ilmu yang sama. Slamet (2003) menyatakan bahwa tujuan penyuluhan pertanian yang sebenarnya adalah perubahan perilaku kelompok sasaran.

Peran Penyuluh sebagai Konsultan

Konsultan adalah ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penelitian, dagang, dan sebagainya). Konsultan sebagai seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasihat ahli dalam bidang keahliannya, misalnya

akuntansi, lingkungan, biologi, hukum, dan lain-lain. Secara umum, konsultan melakukan pekerjaan seperti *pitching*, riset, analisis, dan *report writing*.

1. *Pitching*, yaitu menjual dan menawarkan jasa. Kegiatan ini bisa berupa menyiapkan dokumen dan meriset *klien* yang prospektif, menulis proposal, atau melakukan presentasi
2. *Research*, yaitu menjalankan riset sekunder terhadap *klien* dan pihak terkait dengan menggunakan sumberdaya internal maupun sumber-sumber luar, melakukan *interview* mengenai kebutuhan klien dan mendapatkan pemahaman mengenai masalah klien, memfasilitasi diskusi tentang isu yang dihadapi klien, analisis, yaitu membuat permodelan dalam bentuk struktur tertentu tentang konsep pemecahan masalah, melakukan analisis dari data yang telah diperoleh dan model yang telah disusun dan membantu menyusun rekomendasi yang diperlukan.
3. *Report writing*, yaitu menyiapkan keputusan final, membantu klien dan menunjukkan temuan serta rekomendasi yang telah dibuat.

Seorang organisator dapat mendorong orang bekerja karena dorongan dari dalam dirinya. Penyuluh sebaiknya memiliki kecakapan memimpin, artinya dapat mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, memotivasi petani. Keberhasilan kegiatan penyuluhan bergantung pada kemampuan penyuluh memimpin dan mengorganisasikan pembelajaran sehingga dapat mewujudkan tujuan penyuluhan sesuai yang dikehendaki (Lindner 1998).

Dalam penelitian ini, defenisi peran penyuluh sebagai konsultan adalah, peran penyuluh memberi bimbingan, pertimbangan, atau nasehat kepada masyarakat dalam melakukan diversifikasi pangan.

Peran Penyuluh sebagai Motivator

Seorang motivator harus bisa membangkitkan semangat dan mengubur kelemahan yang dimiliki anak didik walau bagaimanapun latar belakang keluarganya, bagaimanapun kelimasa lalunya dan bagaimanapun berat tantangannya. Menurut Hamalik (2008), motivasi belajar penting artinya dalam proses belajar, karena berfungsi mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Oleh karena itu, prinsip-prinsip motivasi belajar sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip belajar itu sendiri. Niazda (2011),

menyebutkan bahwa seorang motivator memiliki sifat-sifat positif, rasa berterima kasih kepada orang-orang terbaik yang bekerja bersama, menyadari pentingnya harga diri dan kecerdasan emosi.

Motivasi disampaikan lewat komunikasi lisan antar motivator dengan orang lain, yang mengharuskan motivator memiliki kecerdasan emosi yang baik karena kecerdasan emosi adalah dasar untuk berkomunikasi baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Kecerdasan emosi mencakup pengelolaan emosi diri sendiri maupun orang lain. Empati adalah menempatkan diri seolah-olah menjadi seperti orang lain. Perlu disadari bahwa sesungguhnya motivasi hanya bekerja di luar, api motivasi sebenarnya berada di dalam diri masing-masing. Oleh karena itu dengan berusaha menempatkan diri menjadi orang lain, ide-ide untuk memotivasi orang akan menjadi lebih tajam karena kita melihat dengan kacamata orang tersebut bukan dengan kacamata kita sendiri.

Dalam penelitian ini, defenisi peran penyuluh sebagai motivator adalah, peran penyuluh dalam mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan.

Peran Penyuluh sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan (Indo SDM 2013). Tugas seorang fasilitator adalah menata acara belajar, menyiapkan materi, dan penyajian materi sesuai dengan bidangnya, menata situasi proses belajar, mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok, mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai kebutuhan, mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik/*feedback* kepada anggota kelompok, selanjutnya apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, fasilitator juga bertugas sebagai mediator atau penengah untuk mengembalikan topik pembicaraan ke jalur yang benar, merumuskan kegiatan dan hasil kegiatan peserta,

mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan dan memiliki kemampuan seorang fasilitator.

1.4. Manajemen Pengetahuan dan Inovasi

Pengetahuan merupakan keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah (Nawawi 2012), sedangkan manajemen pengetahuan adalah serangkaian proses yang dikembangkan di dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mengakuisisi, mengumpulkan, menyimpan dan mendiseminasikan pengetahuan tersebut sehingga meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan menggabungkan pengetahuan ke dalam kegiatan organisasi (Laudon dan Laudon, 2012). Menurut Hashemiannejad (2014), dalam manajemen pengetahuan terjadi proses yang melibatkan tahapan awal berupa pengumpulan, ekstrak, dan penyimpanan data, untuk kemudian dikonversi dan diubah ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk digunakan.

Ada 3 pilihan peran yang dapat dilakukan dalam manajemen pengetahuan (Nawawi 2012): (1) peran manajemen pengetahuan dalam mengelola pengetahuan, mengosentrasikan diri dalam kodifikasi pengetahuan dan menempatkannya dalam reposisi pengetahuan yang dapat diakses oleh karyawan sesuai dengan otoritasnya; (2) peran manajemen pengetahuan yang diarahkan untuk mempertemukan antara orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang membutuhkan pengetahuan dengan identifikasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; (3) peran manajemen pengetahuan dalam mengombinasikan antara pilihan pertama dan pilihan kedua, menumbuhkan sumber daya yang lebih besar.

Dalam manajemen pengetahuan terdapat tiga komponen penting : (1) manusia (people) sebagai faktor utama dalam penerapan manajemen pengetahuan, (2) proses (process) berhubungan dengan alur kerja dan struktur dalam organisasi serta transformasi pengetahuan, dan (3) teknologi yang berperan serta sebagai enabler dalam manajemen pengetahuan dengan berfungsi sebagai alat yang membantu terjadinya akuisisi, penyimpanan, diseminasi, dan penggunaan pengetahuan (Bhatt, 2009). Lebih lanjut, dijelaskan oleh Tingoy dan Kurt (2009) yang menyoroti komunikasi juga merupakan salah

satu komponen penting dalam proses manajemen pengetahuan, termasuk dalam transformasi data, informasi, dan pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia.

Pendapat para pakar terkait dengan proses manajemen pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pendapat pakar terkait tahapan proses manajemen pengetahuan

No	Proses Management Pengetahuan	Sumber
1.	<p>1. Build Knowledge: membangun pengetahuan dengan memproses data dari eksternal</p> <p>2. Hold Knowledge: Setiap umpan balik dan data yang dihimpun dari eksternal organisasi akan dipilah ke dalam kategori khusus dan disimpan dalam memori. Setelah itu, data akan ditransformasi ke dalam bentuk informasi.</p> <p>3. Pool Knowledge: informasi akan digunakan organisasi untuk digabungkan dan dikembangkan sebagai pengetahuan organisasi. Divisi penelitian akan mengeksplorasi dan memformulasi data eksternal sebagai inovasi baru untuk perusahaan</p> <p>4. Apply Knowledge: pengetahuan diaplikasikan dalam strategi organisasi</p>	<p>Wiig (1993) dalam Sari dan Kurniawan (2015)</p>
2.	<p>1. Identify/ Create: ketika ada kebutuhan pengetahuan tertentu, dilakukan identifikasi pengetahuan sudah tersedia di dalam organisasi atau diperlukan penciptaan pengetahuan.</p> <p>2. Store: jika pengetahuan sudah dipastikan memiliki nilai untuk perusahaan, pengetahuan disimpan sebagai komponen aktif dalam memori organisasi. Pengetahuan harus disimpan dalam cara yang terstruktur sehingga memudahkan pengetahuan untuk dimanipulasi, diambil, dan dibagikan.</p> <p>3. Share: pengetahuan diambil dari memory organisasi untuk dibagi (diseminasi/ komunikasikan) baik secara internal dan eksternal.</p> <p>4. Use: ketika pengetahuan sudah dibagikan, pengetahuan dapat diaktifasi untuk digunakan, baik untuk memecahkan masalah, merumuskan keputusan, meningkatkan efisiensi, ataupun mempromosikan pemikiran inovatif.</p> <p>5. Learn: Fase ini melibatkan upaya untuk mengintegrasikan , menghubungkan , menggabungkan , dan internalisasi pengetahuan. Jika aset pengetahuan yang ditemukan memiliki nilai dan berharga, berdasarkan kriteria analisis dan penilaian yang disebutkan sebelumnya, mereka melanjutkan ke tahap meningkatkan dalam model KMC, di mana kegiatan perbaikan lebih lanjut dan / atau kodifikasi / enkapsulasi berlangsung.</p>	<p>Evans et al. (2014)</p>

	<p>Namun, jika aset pengetahuan yang dinilai cukup (atau tidak lengkap) , pencari kembali ke mengidentifikasi dan / atau membuat fase di mana aset pengetahuan tambahan diidentifikasi atau dibuat berdasarkan kesenjangan yang ditemukan</p> <p>6. Improve: pembelajaran yang berlangsung di fase sebelumnya mengarah ke perbaikan lebih lanjut dari aset pengetahuan. Nilai baru baik diidentifikasi atau dibuat dari mereka dan penambahan atau update yang dibuat untuk menjaga mereka saat ini dalam memori organisasi dan berlaku untuk konteks organisasi</p> <p>7. Create</p>	
3.	<p>1. Knowledge Acquisition: upaya untuk menciptakan dan mengumpulkan berbagai pengetahuan melalui disain sistem dan jaringanyang memudahkan untuk menemukan pengetahuan baru ataupun untuk mencari pakar untuk pengetahuan yang dicari.</p> <p>2. Knowledge Store: pengetahuan disimpan dalam sistem database sehingga aman dan bisa digunakan oleh anggota organsiasi.</p> <p>3. Knowledge Disseminate: pengetahuan dibagi kepada para pengguna menggunakan berbagai media komunikasi.</p> <p>4. Knowledge Apply: pengetahuan harus dapat diaplikasikan sebagai bagian dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.</p>	Laudon dan Laudon (2012)
4.	<p>1. Knowledge capture and/or creation: identifikasi dan kodifikasi pengetahuan internal maupun eksternal; menciptakan dan mengembangkan pengetahuan baru sebagai inovasi yang belum pernah ada di dalam organisasi.</p> <p>2. Knowledge sharing and dissemination: melakukan kontekstualisasi sebagai upaya untuk mengidentifikasi atribut inti pada isi pengetahuan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna - sehingga pengetahuan bisa dibagi dan didiseminasi kepada pengguna.</p> <p>3. Knowledge acquisition and application: tahapan pengguna memahami dan memutuskan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Para pengguna akan memvalidasi kegunaan dan memberikan sinyal jika pengetahuan sudah ketinggalan jaman. Melalui evaluasi terhadap pengetahuan ini pengguna akan berkontribusi untuk tahapan berikutnya.</p>	Dalkir (2005)

BAB III. METODE PENELITIAN

1.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian adalah studi kasus, dengan unit analisis Balai Penyuluhan Pertanian. Penelitian ini akan merancang model transformasi Balai Penyuluhan Pertanian yang mampu berperan dalam manajemen inovasi dan bisnis sosial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional .

1.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni-November 2018. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan pemilihan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Guguak dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mungka di Kabupaten 50 Kota sebagai obyek penelitian. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Guguak dipilih sebagai obyek penelitian dengan alasan: merupakan Balai Penyuluhan Pertanian Model yang terbaik di Kabupaten 50 Kota sedangkan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mungka mewakili Balai Penyuluhan Pertanian yang bukan model.

1.3. Populasi dan Responden

Sumber data primer untuk menjawab tujuan penelitian adalah wawancara dengan sumber daya manusia dalam organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Guguak dan Mungka yang menjadi penyuluh. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Guguak memiliki 20 orang penyuluh dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Mungka memiliki 21 orang penyuluh. Semua penyuluh pada kedua Balai Penyuluhan tersebut diambil sebagai responden. Sedangkam untuk informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Guguak
2. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mungka
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 50 Kota
4. Ketua Bakorluh Sumatera Barat

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data primer, yang meliputi:
 - a. Data berupa hasil wawancara yang diperoleh dari penyuluh pertanian, serta ditambah wawancara dengan informan kunci yang menjalankan aktivitas mendukung kegiatan penyuluhan pertanian.
 - b. Hasil observasi lapangan.
2. Data sekunder yaitu data-data bersumber dari laporan-laporan atau dokumen–dokumen yangterkait..

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati proses penyuluhan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian.
2. Wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan instrument kuisisioner.
3. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber sekunder berupa dokumen-dokumen.

3.6. Analisis Data

Data-data kualitatif pada penelitian ini dianalisis melalui langkah-langkah (Creswell,2010) sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detil dengan mengcoding data
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis.
5. Mendeskripsikan dan menghubungkan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif. .
6. Menginterpretasi atau memaknai data.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Justifikasi anggaran biaya penelitian dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian

Honorarium Pelaksana					
No	Item Honor	Volume	Satuan	Honor	Total (Rp)
1	Honor koordinator peneliti	1	orang	2.000.000	2.000.000
2	Honor Pembantu peneliti	1	orang	1.400.000	1.400.000
3	Honor petugas Survei	1	orang	600.000	600.000
4	Honor pengolah data	1	orang	600.000	600.000
Total Honor					4.600.000
Bahan Habis Pakai & Peralatan					
No	Bahan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total
1	Pulpen	50	buah	10.000	500.000
2	Kertas HVS 70 gsm ukuran A4	4	Rim	45.000	180.000
3	Buku tulis ukuran folio	10	buah	15.000	150.000
4	Flashdis	3	buah	120.000	360.000
5	Map plastik	50	buah	10.000	500.000
6	Fotocopi literatur	5	paket	50.000	250.000
7	Fotocopi kuisioner	95	paket	10.000	950.000
8	Amplop	2	kotak	29.000	58.000
9	Matrai 6000	15	buah	8.000	120.000
10	Matrei 3000	25	buah	5.000	125.000
11	Beli cartridge warna	1	buah	325.000	325.000
12	Beli isi ulang tinta warna	1	buah	85.000	85.000
13	Voucher internet	2	buah	115.000	230.000
14	Pulsa HP	2	buah	52.000	104.000
15	Fotocopy dan kwintasi	1	paket	33.000	33.000
16	CD RW	2	buah	15.000	30.000
Total Biaya Bahan Habis Pakai & Peralatan					4.000.000

Biaya Perjalanan					
No	Item Perjalanan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Sewa kendaraan survei pendahuluan	1	unit	650.000	650.000
2	Sewa kendaraan survei penelitian	6	unit	650.000	3.900.000
3	Konsumsi pelaksanaan penelitian di lapangan	4	orang	312.500	1.250.000
Total Biaya Perjalanan					5.800.000
Biaya Lain-lain					
No	Item Perjalanan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Publikasi	1	artikel	850.000	850.000
2	Seminar/workshop	1	seminar	1.200.000	1.200.000
3	Fotocopy & jilid proposal	5	eksemplar	110.000	550.000
4	Fotocopy log book, laporan kemajuan & keuangan	5	eksemplar	135.000	675.000
5	Fotocopy & jilid laporan akhir & logbook	5	eksemplar	150.000	750.000
6	Konsumsi dengan responden 1	4	paket	225.000	900.000
7	Konsumsi dengan responden 2	3	paket	225.000	675.000
Total Biaya Lain-lain					5.600.000

Tabel 5. Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium pelaksana	4.600.000
2	Bahan & peralatan habis pakai	4.000.000
3	Biaya perjalanan	5.800.000
4	Biaya lain-lain	5.600.000
Total		20.000.000

4.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan.

Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan																												
Pengumpulan Data																												
Pengolahan Data																												
Penyusunan Laporan																												
Seminar																												

Personalia Pelaksana Penelitian

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Rafnel Azhari, SP. M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 198606052015041001
- d. Disiplin Ilmu : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/III b
- f. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- g. Fakultas/Jurusan : Pertanian/Sosial Ekonomi Pertanian
- h. Alokasi Waktu : 8 jam/minggu

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Yulianti Fitri Kurnia, S.Pt.,M.Si
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDK : 8829330017
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Pangan
- e. Fakultas/Bagian : Peternakan/Teknologi Hasil Ternak
- h. Alokasi Waktu : 8 jam/minggu

Pembimbing : Dr.Ir. Endry Martius., M,Sc

DAFTAR PUSTAKA

- Akram K, Siddiqui SH, Nawaz MA, Ghauri T, Cheema AKH.2011. Role of Knowledge Management to Bring Innovation: an Integrated Approach. *Int. Bus. Res* 11 (11) : 121-134.
- Ariani, Mewa. 2010. Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan. *Jurnal Gizi Indon* 2010, 33(1):20-28.
- Arumsari dan Rini 2008. Peran Wanita Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 13 No 1 Hal: 71 – 82.
- Ariani, M., *et al.*, 2007. Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis di Papua, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian-Departemen Pertanian. ISBN : 978-979-3566-62-7.
- Arifin, B. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- BPS. 2017. Data Ekspor Impor. [Internet]. Diakses 03 Mei 2017
- Creswell JW. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Sabran B penerjemah: Maulana A, Hardani W, editor. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Research Design: Qualitative and Mixed Method Approaches*
- Dalkir K. 2005. *Knowledge Management in Theory and Practice*. Oxford (GB): Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Kemenristekdikti. 2017. Anggaran Penelitian Kemenristekdikti tahun 2017 Mencapai 1,395 Triliun. [Internet] [diunduh 01 Mei 2017)
- Laudon KC, Laudon JP. 2012. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* 12th edition New Jersey (US): Pearson Prentice Hall.
- Mulyanto, A. 2008. Implementasi Knowledge Management untuk meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi. Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi 2008 – IST AKPRIND Yogyakarta
- Nawawi L 2012. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); Teori dan Aplikasi Dalam Mewujudkan Daya Saing Organisasi Bisnis dan Publik. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, R. 2013. Dukungan DPRD DKI Jakarta terhadap Peningkatan Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. Makalah Seminar: Perempuan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan. UI. Depok.
- Permata TV. 2005. Analisis Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Komunikasi BPTP Jawa Barat [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Pramudyo, C.S, 2007, Perancangan Model Fungsi Collaborative Knowledge Retrieval Pada Manajemen Pengetahuan (Studi Kasus: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tesis, ITB, Bandung.
- RIP Unad, 2013. Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas. Padang: Unad
- Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* New York : Oxford University Press.
- Simatupang, Pantjar. 2007. Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*

- Volume 25 No. 1 Juli 2007 : 1-18. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Spielman DJ, Ragasa C, Rajalahti R. 2012. Designing Agricultural Research Linkages Within an AIS framework: World Bank, editor. Agricultural Innovation Systems Washington (US): World Bank. Hlm 277-288.
- Sumarjanto D, Kristiadi HJ, Dati DW. 2013. Kontribusi Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) Dalam Mendorong Pemanfaatan Hasil Litbang Migas. Lembaran Publ Miny Gas Bumi 1 (47):36-47.
- Tobing, Paul L. 2007. Knowledge Management: Konsep Arsitektur dan Implementasi, Graha Ilmu
- Umiarsih R. 2011. Kepuasan Anggota Poktan/Gaoktan Terhadap Layanan Jasa Litbang Pertanian Melalui Program FEATI Mencapai 87,7% [Internet] [diunduh 03 Mei 2017].
- World Bank. 2006. Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond Strengthening Research Systems. Washington DC (US): World Bank.
- World Bank, 2017. Agricultural Policy and Evaluation Report. [Internet] diunduh 03 Mei 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

Honorarium Pelaksana					
No	Item Honor	Volume	Satuan	Honor	Total (Rp)
1	Honor koordinator peneliti	1	orang	2.000.000	2.000.000
2	Honor pembantu peneliti	1	orang	1.400.000	1.400.000
3	Honor petugas survey	1	orang	600.000	600.000
4	Honor pengolah data	1	orang	600.000	600.000
Total Honor					4.600.000
Bahan Habis Pakai & Peralatan					
No	Bahan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total
1	Pulpen	50	buah	10.000	500.000
2	Kertas HVS 70 gsm ukuran A4	4	Rim	45.000	180.000
3	Buku tulis ukuran folio	10	buah	15.000	150.000
4	Flashdis	3	buah	120.000	360.000
5	Map plastik	50	buah	10.000	500.000
6	Fotokopi literatur	5	paket	50.000	250.000
7	Fotocopi kuisioner	95	paket	10.000	950.000
8	Amplop	2	kotak	29.000	58.000
9	Matrai 6000	15	buah	8.000	120.000
10	Matrei 3000	25	buah	5.000	125.000
11	Beli cartridge warna	1	buah	325.000	325.000
12	Beli isi ulang tinta warna	1	buah	85.000	85.000
13	Voucher internet	2	buah	115.000	230.000
14	Pulsa HP	2	buah	52.000	104.000
15	Fotocopy dan kwintasi	1	paket	33.000	33.000
16	CD RW	2	buah	15.000	30.000
Total Biaya Bahan Habis Pakai & Peralatan					4.000.000

Biaya Perjalanan					
No	Item Perjalanan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Sewa kendaraan survei pendahuluan	1	unit	650.000	650.000
2	Sewa kendaraan survei penelitian	6	unit	650.000	3.900.000
3	Konsumsi pelaksanaan penelitian di lapangan	4	orang	312.500	1.250.000
Total Biaya Perjalanan					5.800.000
Biaya Lain-lain					
No	Item Perjalanan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Publikasi	1	artikel	850.000	850.000
2	Seminar/workshop	1	seminar	1.200.000	1.200.000
3	Fotocopy & jilid proposal	5	eksemplar	110.000	550.000
4	Fotocopy log book, laporan kemajuan & keuangan	5	eksemplar	135.000	675.000
5	Fotocopy & jilid laporan akhir & logbook	5	eksemplar	150.000	750.000
6	Konsumsi dengan responden 1	4	paket	225.000	900.000
7	Konsumsi dengan responden 2	3	paket	225.000	675.000
Total Biaya Lain-lain					5.600.000

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

No	Nama NIDN/ NIDK	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Ming gu)	Jabatan dalam Tim
1.	Rafnel Azhari, SP.,Msi	Fak. Pertanian	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	8	Ketua Peneliti
2.	Yulianti Fitri Kurnia,S.Pt.,M.Si	Fak.Peternakan	Ilmu Pangan	7	Anggota 1
3.	Istiqomah Oktariq	Fak. Pertanian	Agribisnis	6	Mahasiswa/ A2
4.	Siti Mewah Siregar	Fak. Pertanian	Agribisnis	6	Mahasiswa/A3